

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abidin. Z. S, *Strategi Kebijakan Dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*, Suara Bebas, Jakarta, 2008.
- Adianto & As'ari Hasim, *Model Penerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, 2016.
- Agus Sudarmansyah, Bakran Suni, Asmadi, *Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dari Fraksi Pdi Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen Di Kabupaten Kubu Raya.*, Jurnal PMIS., Unmul, 2013.
- Ali. M, *Orang Desa. Anak Tiri Perubahan*. Averroes Press, Malang, 2007.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2013.
- Ashofa Burhan, *Analisis kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Selengkapnya lihat, Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta; 2004
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung, 2014
- Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentian di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional, dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Eko Prasoj, "konstruksi ulang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di indonesia: antara sentripetalisme dan sentrifugalisme", dalam Pidato Pengkuhan sebagai Guru Besar Tetap bidang Ilmu

Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2018.

E-Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT.Ikhtiar Baru, Jakarta, 1990

Faizal Liky, *Produk Hukum di Indonesia Perspektif Politik Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan*, Lampung.

Goni Michael G. H. Dkk, *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dprd Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume III No. III. 2019.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel and Russel, New York; 1973,

HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1993

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan 1*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2008

Kell Antoft and Jack Novack, *Grassroots democracy: local Governmentin teh maritimes* (Nova Scotia: Henson College, Delhousie University, 1998.

M.Nasroen, *Soul Pembentukan Daerah Otonom dan Tingkatan Daerah Otonom*, Endang, Jakarta, 1954

Made Pirdata, *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan system.*, cipta, Jakarta; 1990

Made Pirdata. *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan system*, Jakarta Cipta, Jakarta, 1990.

Maria, S.W. Sumardjono, *Metodologi Penulisan Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005

- Marzuki, *Metodologi Riset*, PT Hanindita, Yogyakarta, 1983
- Moleong, Lexy, J., *Metodelogi Penulisan Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung, 2004.
- Muluk Khairul, M.R., *Mengugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah, Sebuah Kajian Partisipasi Publik dengan Pendekatan Berfikir Sistem*. Bayu Media Publishing, Malang, 2007.
- Munir, B, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Bapedda NTB, Mataram, 2002.
- Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Nico Ngani, *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, 2012
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Robert Chambers, *Ideas For Development*, Earthscan, London, 2005
- Robert Chambers, *Ideas For Development*, Earthscan, London, 2005.
- Rozali Abdullah, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 35
- S. Nasution, *Metode Research (Penulisan Ilmiah)*, Bumi Aksara, Bandung, 2006
- S.N.Jha dan P.C.Mathur, *Decenhralization and Local Politics*, lSt Published, Sage Publications India Ltd., New Delhi, 1999
- Saiman. *Politik Perbatasan. Inteligencia*, Media, Malang, 2017
- Sirajuddin, dkk., *Membangun Konstituen Meeting: Mempertemukan Kepentingan Daerah dengan Keterbatasan Wewenang DPD*. YAPPIKA dan MCW, Jakarta, 2006.
- Soekartawi, *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*. Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS*, Malang, 2004
- Susanto, *Pengembangan KTSP dalam Perspektif Managemen Visi*, Matapena, Jakarta, 2007.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penulisan Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018

Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penulisan Lapangan*. UM Press, Malang, 2008

Yuriska, “*Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2010.

Yuswanto, *Kedudukan Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd*. JOM Fakultas Hukum Volume III nomor II. 2016.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Peraturan DPRD Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020.

3. JURNAL

Andi Garfiana Mutiah, *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengelolaan APBD guna mewujudkan Pemerintahan yang baik di Kota Makassar*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Pemerintahan Fakultas Hukum UNHAS Makassar, 2008.

Achmad Fauzi. *Jurnal Hukum. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik.* Vol 16 ,No 1.2019

Habiburrahman. *Jurnal Hukum. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.* Vol 6, No 2. 2016

Muhammadin, *Efektivitas Alokasi Dana Aspirasi dalam Keterwakilan Politik (Studi Fungsi Keterwakilan Politik Anggota DPRD Kota Singkawang Periode 2009-2014),* 2016

M. Rendi Aridhayandi. *Jurnal Hukum. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibanding Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis.* Vol 48, No 4. 2018

Jarawati Simarmata, *Jurnal Hukum Prespektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait.* Vol 12 ,No 2 2015

